



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

RENCANA KERJA TAHUN 2022

BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PEMATANGSIANTAR

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar Tahun 2022 ini didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar Tahun 2020-2024 yang merupakan arahan dalam menetapkan sasaran program kegiatan dan indikator kinerja.

Dokumen Rencana Kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar pada tahun 2022 untuk mencapai target – target yang telah ditetapkan.

Semoga Rencana Kerja ini bermanfaat dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar guna mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan secara keseluruhan.

Pematangsiantar, Januari 2022
Kepala Balai,




Manahan Simangunsong, S.Hut.T, M.Sc
NIP. 19750520 199403 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
A. Tugas Pokok dan Fungsi	3
B. Ruang Lingkup	4
C. Dasar Hukum	5
III. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2021	
A. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur	7
B. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat.....	9
C. Penyelenggaraan Diklat Kerjasama	10
D. Pengembangan KHDTK Sebagai Sarana Pembelajaran Kediklatan	10
IV. RENCANA KERJA TAHUN 2022	
A. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.....	12
B. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK.....	15
C. Layanan Prasarana Internal.....	19
V. PENUTUP	21
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesan utama Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2022 adalah Memperkuat Sumbangan Tapak untuk Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi, dan sasaran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah :

1. Menjaga kecenderungan positif pertumbuhan PDB
2. Menumbuhkan ekspor dan meningkatkan produksi hasil hutan, untuk mendukung surplus neraca perdagangan non migas
3. Terus bergerak meningkatkan kapasitas produksi kelompok tani hutan sebagai upaya membantu pemerataan ekonomi wilayah
4. Mendorong ekonomi sirkular untuk pengelolaan sampah dan limbah, parallel dengan mengurangi beban lingkungan

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2022 tetap menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program dan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial dengan fokus utama pemulihan ekonomi masyarakat. Sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional dimana empat diantaranya terkait Kementerian LHK. Prioritas Nasional ini kemudian dijabarkan secara lebih rinci ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas Nasional dan Proyek Kementerian LHK yang dijabarkan pada Rincian Output Kegiatan dalam Rencana Kerja.

Berdasarkan visi dan misi BP2SDM yang telah dirumuskan, tujuan Badan P2SDM adalah "**Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan**". Melalui tujuan ini, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, inovatif,

dan memiliki daya saing tinggi serta mampu adaptif dengan perkembangan zaman saat ini.

Dokumen Rencana Kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar tahun 2022 merupakan rincian kegiatan dan strategi pelaksanaan yang akan dilakukan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar Tahun 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi pelaksana kegiatan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menyelenggarakan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar Tahun 2022 ini, yaitu:

1. Untuk menjamin bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar sesuai dengan visi dan misi organisasi, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Untuk mempermudah dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar.

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

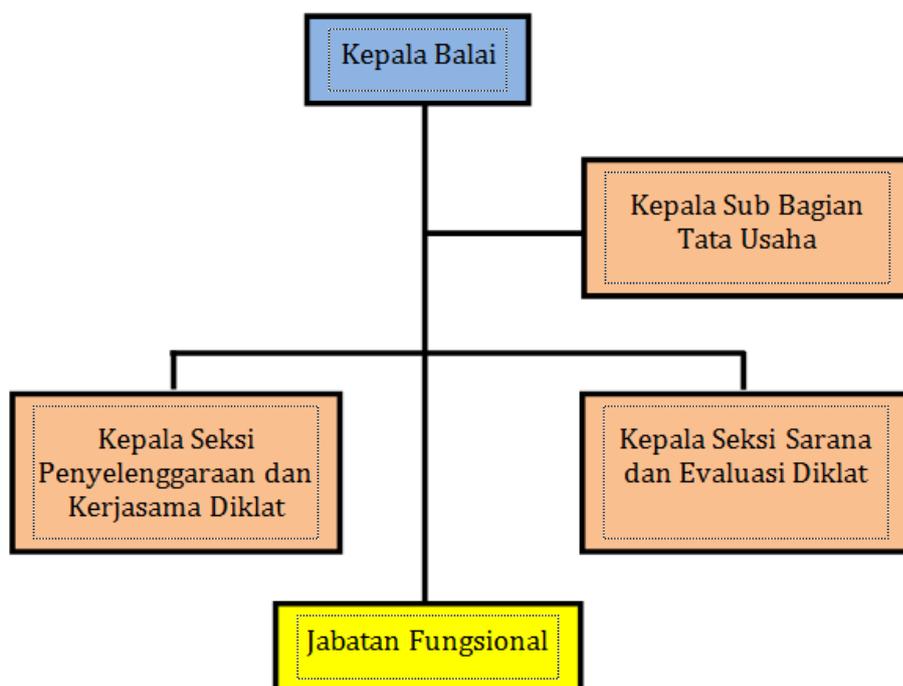
Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Balai Pendidikan dan Pelatihan lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan dan pelatihan;
- b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- c. Pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan hutan pendidikan dan pelatihan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan dan pelatihan;
- g. Pelaksanaan pelayanan data dan informasi pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan, dan Seksi Sarana dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan. Struktur organisasi Balai Diklat LHK Pematangsiantar sebagaimana disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Diklat LHK Pematangsiantar

Jumlah pegawai BDLHK Pematangsiantar Tahun 2021 (data pada Bulan Desember 2021) adalah sebanyak 71 orang, terdiri dari 50 orang PNS, 21 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Adapun PNS di BDLHK Pematangsiantar terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 2 orang, Pejabat Fungsional Widyaiswara sebanyak 11 orang, Fungsional Umum sebanyak 35 orang dan Tenaga Penyuluh Kehutanan 2 orang.

B. Ruang Lingkup

Sebagai bagian integral dari sistem perencanaan program Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam penyusunan Rencana Kerja Balai Diklat Kehutanan Pematangsiantar Tahun 2022 ini mengacu pada Renstra BP2SDM KLHK Tahun 2020 - 2024.

Rencana kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar Tahun 2022, antara lain melingkupi :

1. Penyelenggaraan diklat aparatur dan non aparatur bidang LHK;
2. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM;
3. Penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan.

c. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis (Renstra K/L) 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOMOR P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.435/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2020 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021.
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.16/Menlhk/Setjen/OTL.1/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

III. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2021

Pengukuran tingkat Capaian Kinerja Tahun 2021 pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematang Siantar menggunakan pendekatan perbandingan target dan realisasi dari indikator kinerja kegiatan. Adapun capaian kinerja tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1. Capaian IKK Balai Diklat LHK Pematang Siantar

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan
	Layanan Sarana Internal	1 Unit	1 Unit
	Layanan Prasarana Internal	1 Unit	1 Unit
Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK	Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	1 Unit (67 Poin)	1 Unit (67 Poin)
	Pelatihan SDM Aparatur LHK	39 Orang	39 Orang
	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK	393 Orang	393 Orang
	Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	150 Orang	150 Orang
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	Pelatihan Masyarakat yang terlatih dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	120 Orang	120 orang

A. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur

Penyelenggaraan diklat bagi aparatur dan non aparatur di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar pada Tahun 2021 ditargetkan sebanyak 480 orang. Akan tetapi, dikarenakan Pandemi Covid-19 masih berlanjut sehingga dilakukan revisi anggaran, yang menyebabkan perubahan volume/satuan pada beberapa komponen utama anggaran. Jumlah SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang dilaksanakan melalui diklat bertambah menjadi 540 orang. Pada pelaksanaannya, jumlah SDM yang mengikuti diklat adalah sebanyak 582 orang yang dananya bersumber dari DIPA Balai Diklat Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pematangsiantar Tahun 2021.

Secara rinci kegiatan diklat bagi aparatur dan non aparatur pada Balai Diklat Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pematangsiantar dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Realisasi Diklat yang bersumber dari DIPA Balai Diklat Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pematangsiantar Tahun 2021

NO	Nama Diklat	Peserta (Orang)		Waktu Pelaksanaan
		Rencana	Realisasi	
1.	Pelatihan Pembentukan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	30	39	2-7 dan 14 Agustus 2021
3.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Petani dan Pendampingan Perhutanan Sosial Pada Pola Padat Karya Angkatan 1	30	31	23-26 Februari 2021
3.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Petani dan Pendampingan Perhutanan Sosial Pada Pola Padat Karya Angkatan 2	30	29	23-26 Februari 2021
4.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Petani dan Pendampingan Perhutanan Sosial Pada Pola Padat Karya Angkatan 3	30	34	2-5 Maret 2021
5.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Petani dan Pendampingan Perhutanan Sosial Pada Pola Padat Karya Angkatan 4	30	31	2-5 Maret 2021
6.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Petani dan Pendampingan Perhutanan Sosial Pada Pola Padat	30	33	16-19 Maret 2021

NO	Nama Diklat	Peserta (Orang)		Waktu Pelaksanaan
		Rencana	Realisasi	
	Karya Angkatan 5			
7.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Petani dan Pendampingan Perhutanan Sosial Pada Pola Padat Karya Angkatan 6	30	34	16-19 Maret 2021
8.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Petani dan Pendampingan Perhutanan Sosial Pada Pola Padat Karya Angkatan 7	30	34	16-19 Maret 2021
9.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Petani dan Pendampingan Perhutanan Sosial Pada Pola Padat Karya Angkatan 8	30	29	23-26 Maret 2021
10.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Petani dan Pendampingan Perhutanan Sosial Pada Pola Padat Karya Angkatan 9	30	31	23-26 Maret 2021
11.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Petani dan Pendampingan Perhutanan Sosial Pada Pola Padat Karya Angkatan 10	30	33	06-09 April 2021
12.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Petani dan Pendampingan Perhutanan Sosial Pada Pola Padat Karya Angkatan 11	30	34	06-09 April 2021
13.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Petani dan Pendampingan Perhutanan Sosial Pada Pola Padat Karya Angkatan 12	30	38	06-09 April 2021
14.	Pengelolaan sampah organik untuk budidaya Maggot BSF	30	30	23-30 Juni 2021
15.	Pelatihan Pemguatan Kelembagaan KUPS di Lahan Gambut	30	30	13-15 September 2021
16.	Pelatihan Teknik Silvofishery di Lahan Gambut	30	30	15-18 September 2021
17.	Pelatihan Budidaya Lebah Madu Kelulut (Trigona Spp)	30	30	17- 21 September 2021
18.	Wanaternak Unggas di Lahan Gambut	30	30	22- 25 September 2021
JUMLAH		540	582	

B. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat

Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat yang Mampu Mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara Lestari yang meningkat kapasitasnya dalam bidang kehutanan direncanakan untuk 4 (empat) jenis diklat (terbagi 4 Angkatan) dengan target peserta sebanyak 120 orang. Realisasi penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat pada Tahun 2021 sebanyak 120 orang peserta. Secara rinci realisasi penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat yang Mampu Mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara Lestari dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Realisasi Pelatihan Masyarakat yang Mampu Mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara Lestari Tahun 2021

NO	Nama Diklat	Peserta (Orang)		Waktu Pelaksanaan
		Rencana	Realisasi	
1.	Pelatihan Pengukuran dan Pemetaan Partisipatif Berbasis Ponsel	30	30	08-12 Maret 2021
2.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas KTH dan KPS dalam Pengelolaan Usaha	30	30	16-19 Februari 2021
3.	Teknik Pengolahan Bambu	30	30	27-31 Juli 2021
4.	Pelatihan Pemandu Wisata Alam	30	30	2-6 Agustus 2021
JUMLAH		120	120	

C. Penyelenggaraan Diklat Kerjasama

Dalam rangka pengembangan program diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Diklat Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pematangsiantar melaksanakan beberapa kerjasama bidang penyelenggaraan diklat dengan UPT lain lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta lembaga yang terkait dalam pengembangan SDM di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kerjasama ini dimaksudkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dan non aparatur kehutanan (masyarakat) pada Wilayah pelayanan Balai

Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar. Secara rinci jenis diklat kerjasama serta waktu pelaksanaannya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Realisasi Diklat Kerjasama Tahun 2021

No.	Nama Diklat	Peserta		Waktu Pelaksanaan	Sumber Dana	Kerjasama dengan Instansi
		Akt	Org			
1.	Pelatihan Ganis PHPL Pemanfaatan HHBK Kelompok Getah	1	34	29 Maret-10 April 2021	BPHP Wilayah II Medan dan APHI Komda Sumut- Aceh	BPHP Wilayah II Medan dan APHI Komda Sumut- Aceh
2.	Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew I)	1	40	5-10 Juli 2021	APHI Komda Sumut-Aceh dan PT. Toba Pulp Lestari, Tbk	APHI Komda Sumut-Aceh dan PT. Toba Pulp Lestari, Tbk.
3.	Pelatihan Aplikasi GNSS Untuk Survei dan Pemetaan	1	30	9-17 November 2021	BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh
Total		3	104			

D. Pengembangan KHDTK Sebagai Sarana Pembelajaran Kediklatan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk Pengembangan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Diklat Pondok Buluh sebagai Sarana Pembelajaran Kediklatan dari bulan Januari s.d Desember 2021 yaitu meliputi Patroli Pengamanan KHDTK, Pemeliharaan Demplot (Persemaian, Bambu, Jalur *Tracking*), Pengembangan Arboretum, Pengembangan Ekoeduwisata, Pembinaan kelompok tani.

IV. RENCANA KERJA TAHUN 2022

Pagu anggaran Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 10.296.000.000,-. Sumber dana anggaran tersebut adalah berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 9.836.000.000,- (95,53%) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 460.000.000,- (4,65%).

Tabel 4. Target IKK Balai Diklat LHK Pematangsiantar tahun 2022

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM	Layanan Umum	1 Layanan
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
	Layanan Sarana Internal	1 Unit
	Layanan Prasarana Internal	1 Unit
Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK	Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	1 Unit (68 Poin)
	Pelatihan SDM Aparatur LHK	30 Orang
	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK	90 Orang
	Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	90 Orang
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	Pelatihan Masyarakat yang terlatih dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30 Orang

Rencana penyelenggaraan kegiatan kediklatan Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar untuk mencapai output sebagai berikut:

A. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Output Dukman terdiri dari beberapa komponen dan kemudian dibagi dalam beberapa subkomponen yang diantaranya yaitu:

1. Layanan Perkantoran

1.1 Gaji dan Tunjangan

a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Meliputi pembayaran gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat lainnya bagi pegawai dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 6.476.000.000.

2.1 Operasional dan Pemeliharaan kantor

a. Perawatan Gedung Kantor

Dalam kegiatan ini diperlukan pemeliharaan asrama di Pematangsiantar dan KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 522.850.000.

b. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4

Perawatan keandaran roda 4 sebanyak 7 unit dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 231.000.000

c. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2

Untuk perawatan kendaraan roda 2 sebanyak 7 unit dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 25.900.000.

d. Perawatan Sarana Gedung dan Bangunan

Dalam kegiatan ini meliputi perawatan dan pemeliharaan sarana atau fasilitas pendukung perkantoran yang diantaranya AC split, mesin potong rumput, personal komputer, laptop, printer, genset dan barang inventaris lainnya dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 108.600.000.

e. Perawatan Jaringan

Meliputi pemeliharaan dan perawatan instalasi jaringan baik jaringan listrik, telepon, air, internet, gas dan CCTV dalam jangka 12 bulan (satu tahun anggaran) dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 49.800.000.

f. Langganan Daya dan Jasa

Kegiatan ini meliputi belanja langganan jasa baik jaringan listrik, air, telepon dan lainnya dalam jangka 12 bulan pemeliharaan dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 214.200.000.

g. Tunjangan Pengelolaan Kegiatan Perkantoran

Kegiatan ini merupakan belanja honorarium operasional satuan kerja yang meliputi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan lainnya dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 178.080.000.

h. Operasional Perkantoran

Kegiatan ini meliputi Belanja Keperluan perkantoran yang didalamnya terdiri dari belanja langganan internet, langganan surat kabar/koran, penggandaan/fotocopy, pencetakan, penjilidan, keperluan sehari-hari perkantoran, inventarisasi barang inventaris, operasional widyaiswara, operasional perpustakaan, biaya instruktur senam dan juga honorarium pegawai non PNS seperti satpam, pengemudi, pramubakti dan tenaga administrasi. Selain itu dalam belanja operasional perkantoran ini juga meliputi biaya pengiriman surat dan dokumen dan biaya pencetakan blanko/amplop/formulir dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 1.069.570.000.

2. Layanan Dukungan Manajemen satker

2.1 Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran

a. Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan/Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)

Dalam kegiatan ini diperlukan alat tulis kantor dan bahan keperluan untuk penyusunan atau revisi POK, dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 2.000.000.

b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Dalam kegiatan ini ada keperluan alat tulis kantor dan bahan keperluan penyusunan rencana anggaran dan perjalanan dinas untuk kegiatan rapat maupun revisi terkait anggaran, dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 20.520.000.

c. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Keperluan dalam kegiatan ini diantaranya bahan-bahan keperluan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 2.000.000.

2.2 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

a. Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

Dalam kegiatan ini diperlukan alat tulis kantor dan bahan keperluan penyusunan laporan SPIP per triwulannya dan biaya honorarium tim satgas SPIP yang telah dibentuk, dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 13.250.000.

2.3 Pengelolaan Kepegawaian

a. Tata Administrasi Kepegawaian

Kegiatan ini meliputi perjalanan konsultasi kepegawaian ke pusat dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 7.000.000

b. Pengembangan Organisasi

Dalam kegiatan ini meliputi perjalanan dalam rangka raker lingkup kementerian LHK, konsultasi teknis lingkup BP2SDM dan konsultasi ke pusat dan ke medan dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 49.450.000.

2.4 Pelayanan Umum dan Perlengkapan

a. Leaflet

Dalam kegiatan ini diperlukan belanja bahan keperluan penyusunan leaflet, honorarium tim penyusun leaflet dan belanja pencetakan leaflet sebanyak 1 judul dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 5.780.000.

c. Renovasi Gedung dan Bangunan

Dalam kegiatan ini diperlukan biaya perencanaan dan pengawasan serta biaya renovasi fisik gedung dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 125.000.000

B. Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

1. SDM Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya

Dalam output tersebut terbagi dalam beberapa komponen diklat dan pendukung kediklatan yang diantaranya:

1.1 Pelatihan Teknis dan Fungsional

Indikator pencapaian sasaran di atas meliputi:

a. Pelatihan Pengawas Lingkungan Hidup

Diklat ini dilaksanakan selama 5 Hari bagi Aparatur melalui metode jarak jauh/*elearning* dengan jumlah peserta 30 Orang. Biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan diklat dimaksud sebesar Rp. 90.000.000.

1.2 Pendukung kediklatan

Dalam komponen pendukung kediklatan ada beberapa subkomponen dalam mencapai sasaran dimaksud meliputi:

a. Pengelolaan Administrasi Kediklatan

Meliputi perjalanan konsultasi penyelenggaraan diklat ke pusat dan koordinasai wilayah pelayanan dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 11.560.000.

b. Peningkatan Tenaga Kediklatan

Kegiatan ini meliputi biaya mengikuti diklat/workshop/studi banding dan perjalanan yang melekat dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 3.000.000.

c. Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD)

Dalam kegiatan IKD tersebut meliputi belanja bahan keperluan kegiatan hingga pelaporan, honorarium tim penyusun instrumen dan laporan IKD dan biaya komunikasi dalam pengambilan data dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 10.000.000.

d. Evaluasi Pasca Diklat (EPD)

Dalam kegiatan EPD meliputi belanja bahan keperluan kegiatan hingga pelaporan, honorarium tim penyusun instrumen dan laporan dan biaya

komunikasi dalam pengambilan data dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 10.000.000.

e. Kegiatan Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang meliputi Biaya Rapid Tes Antigen/Swab Test dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 5.000.000.

f. Pembuatan Banner/Spanduk/Baliho/Stiker

Kegiatan ini meliputi pembuatan Banner/Spanduk/Baliho/Stiker dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 3.000.000.

g. Pengadaan Lisensi Aplikasi Teleconference

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pembelian lisensi aplikasi *Teleconference Zoom Cloud Meeting* guna memperlancar kegiatan satker dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 2.649.000.

h. Operasional Kegiatan Virtual/Daring

Kegiatan ini meliputi Biaya Komunikasi Virtual/Daring (4 orang x 6 bulan) dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 4.800.000

2. SDM Non Aparatur yang meningkat kapasitasnya

Dengan mewabahnya pandemi covid-19 dan memperhatikan himbauan pemerintah untuk meniadakan kegiatan tatap muka, maka kegiatan pelatihan akan dilaksanakan dengan metode jarak jauh/*elearning*. Jenis-jenis diklat yang dilaksanakan adalah:

a. Pelatihan Budidaya Lebah Trigona Sp

Pelatihan ini dilaksanakan sebanyak 1 angkatan, selama 4 Hari melalui metode jarak jauh/*elearning* dengan jumlah peserta 30 Orang. Biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelatihan dimaksud sebesar Rp. 90.000.000.

b. Pelatihan Sig Berbasis Ponsel

Pelatihan ini dilaksanakan sebanyak 1 angkatan, selama 4 Hari dengan metode jarak jauh/*elearning* dengan jumlah peserta 30 Orang. Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 90.000.000.

c. Pelatihan Teknik Pencegahan Karhutla Bagi MPA

Pelatihan ini dilaksanakan sebanyak 1 angkatan, selama 4 Hari dengan metode jarak jauh/*elearning* dengan jumlah peserta 30 Orang. Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 90.000.000.

3. Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang beorientasi industri usaha

Untuk meningkatkan kompetensi SDM tenaga teknis kehutanan yang beorientasi industri usaha akan dilaksanakan jenis-jenis diklat :

a. Pelatihan Teknik Pengolahan Nira Aren

Pelatihan ini dilaksanakan sebanyak 1 angkatan, selama 4 Hari dengan metode jarak jauh/*elearning* dengan jumlah peserta 30 Orang. Biaya yang dibutuhkan untuk pelatihan ini sebesar Rp. 90.000.000.

b. Pelatihan Pengukuran Dan Pemetaan Partisipatif Berbasis Ponsel

Pelatihan ini dilaksanakan sebanyak 1 angkatan, selama 4 Hari dengan metode jarak jauh/*elearning* dengan jumlah peserta 30 Orang. Biaya yang dibutuhkan untuk pelatihan ini sebesar Rp. 90.000.000.

c. Pelatihan Pembuatan Pupuk Bokashi

Pelatihan ini dilaksanakan sebanyak 1 angkatan, selama 4 Hari dengan metode jarak jauh/*elearning* dengan jumlah peserta 30 Orang. Biaya yang dibutuhkan untuk pelatihan ini sebesar Rp. 90.000.000.

4. SDM Masyarakat yang mampu mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lestari

Pelaksanaan Pelatihan bagi masyarakat akan dilaksanakan dengan metode jarak jauh/*elearning* dikarenakan situasi pandemi covid-19 yang mewabah. Sehingga tidak dapat dilaksanakan secara langsung/tatap muka. Pelatihan masyarakat direncanakan sebanyak 150 orang terbagi dalam 5 angkatan yang diantaranya:

- a. Pelatihan Teknik Pembuatan Cuka Kayu/Bambu (Wood Bamboo Vinegar) sebagai Desinfektan

Pelatihan ini dilaksanakan selama 4 hari dengan metode jarak jauh/*elearning* dengan jumlah peserta 30 orang sebanyak 2 angkatan. Biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelatihan ini sebesar Rp. 112.064.000.

- b. Pelatihan Teknik Pencegahan Karhutla Bagi MPA

Pelatihan ini dilaksanakan selama 4 hari dengan metode jarak jauh/*elearning* dengan jumlah peserta 30 orang sebanyak 2 angkatan. Biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelatihan ini sebesar Rp. 127.424.000.

- c. Pelatihan SIG Berbasis Ponsel

Pelatihan ini dilaksanakan selama 4 hari dengan metode jarak jauh/*elearning* dengan jumlah peserta 30 orang sebanyak 1 angkatan. Biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelatihan ini sebesar Rp. 60.512.000.

5. Nilai KHDTK yang dikelola

Dalam mencapai output nilai KHDTK dimaksud dibagi dalam komponen dan subkomponen yang diantaranya:

Pengembangan KHDTK sebagai Sarana Pembelajaran Kediklatan

- a. Operasional KHDTK

Kegiatan ini meliputi biaya operasional pengelolaan KHDTK, biaya operasional penyuluh 2 (dua) orang selama 12 (dua belas) bulan dan perjalanan ke KHDTK dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 169.680.000.

- b. Patroli Pengamanan KHDTK

Merupakan biaya dalam melaksanakan patrol pengamanan KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 28.800.000.

- c. Pemeliharaan Demplot

Meliputi pemeliharaan demplot persemaian, bambu, arboretum dan MPTS selama 12 (dua belas) bulan dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 48.000.000.

d. Pembuatan Workshop Kayu Bulat Dan Gergajian

Kegiatan Pembuatan Workshop Kayu Bulat Dan Gergajian ini direncanakan dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 150.000.000.

e. Pembinaan Kelompok Tani, 2 Kegiatan

Dalam kegiatan ini meliputi biaya belanja bahan keperluan kegiatan, honorarium pelaksana kegiatan, belanja konsumsi dan uang harian peserta pembinaan kelompok tani dan belanja honor narasumber dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 28.520.000.

C. Layanan Prasarana Internal

1. Renovasi Gedung dan Bangunan

Dalam kegiatan ini diperlukan biaya perencanaan dan pengawasan serta biaya renovasi fisik gedung dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 125.000.000

Dalam rangka mendukung kegiatan penyelenggaraan Diklat Lingkungan Hidup Dan Kehutanan pada Tahun 2022 diperlukan alokasi anggaran yang memadai. Alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan tahun 2022 pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar sebesar Rp. 10.296.000.000,- (disajikan pada tabel 4 berikut)

Tabel 4. Perincian Alokasi Anggaran Balai Diklat Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pematangsiantar Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	2	3
1. Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Anggaran		
a.	Rupiah Murni (RM)	9.836.000.000
b.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	460.000.000
Jumlah		10.296.000.000
2. Alokasi anggaran berdasarkan kegiatan / output :		
2.1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan		

dan Pengembangan SDM		
a.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	100.000.000
b.	Layanan Perkantoran	8.76.000.000
2.2 Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK		
a.	SDM Aparatur LHK Meningkatkan Kapasitasnya	140.000.000
b.	SDM Non Aparatur LHK Meningkatkan Kapasitasnya	270.000.000
c.	Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang beorientasi industri usaha	270.000.000
d.	SDM Masyarakat yang mampu mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lestari	90.000.000
e.	Nilai KHDTK yang dikelola	425.000.000
Jumlah		10.296.000.000

V. PENUTUP

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dalam mengemban tugas pelayanan pembangunan dan pemerintahan harus terus bertumbuh dan berkembang menjadi institusi yang berkinerja produktif dan profesional, peningkatan dan pengembangan kualitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Bersih, Kompeten, dan Melayani guna mendukung kinerja pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam mendukung kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berbagai langkah pembaruan kebijakan pembangunan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus terus dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

Peningkatan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia harus terus diarahkan guna mengisi kesenjangan kompetensi SDM dan pengembangan kapasitas pelaku utama pembangunan sehingga berbagai program kerja pembangunan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mengarah sesuai kebutuhan dan dinamika penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, juga harus terintegrasi dan selaras dengan program kerja teknis yang dikembangkan. Untuk itu, tugas untuk meningkatkan kualitas SDM tidak semata-mata berada di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, tetapi melekat pada seluruh elemen penyelenggara pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan baik di setiap tingkatan pemerintahan pusat maupun daerah, dunia usaha/termasuk lembaga swadaya masyarakat.

Rencana Kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar Tahun 2022 ini menyajikan arahan yang bersifat operasional dan merupakan dokumen rencana pelaksanaan penyelenggaraan diklat lingkungan hidup dan kehutanan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar mendapat alokasi anggaran senilai Rp. 10.296.000.000 (Sepuluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).

Agar penyelenggaraan kegiatan diklat lingkungan hidup dan kehutanan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar diharapkan semua pihak yang terkait dapat berperan aktif dalam keseluruhan proses penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya. Selain itu, diharapkan pula adanya masukan-masukan dan saran-saran guna lebih mengembangkan program dan kegiatan penyelenggaraan diklat lingkungan hidup dan kehutanan di masa datang.

Akhirnya, dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan penyelenggaraan kegiatan baik pendidikan dan pelatihan bidang lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2022 lebih terarah, efisien, efektif dan optimal dalam upaya mendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup dan kehutanan.